

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kota metropolitan di Indonesia. Sebagai kota metropolitan keberadaan penduduk Kota Semarang mencapai pada angka 1,7 juta jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan status metropolitan Kota Semarang menyebabkan tingginya permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah kota yang tidak lepas dengan permasalahan pada kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya permasalahan yang timbul akibat kepadatan penduduk.

BPS Kota Semarang tahun 2023 mencatat sekitar 4.441,05 jiwa/km² (persegi) memadati wilayah di Kota Semarang.² Mengacu pada angka tersebut Kota Semarang dikategorikan ke dalam kota dengan kepadatan penduduk yang sangat padat oleh KPUPR.³ Kondisi yang demikian, menjadi awal permulaan dari segala permasalahan publik yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Semarang menyebabkan terjadi beberapa permasalahan yang cukup signifikan di sektor lainnya. Hal ini mengacu pada tulisan Todaro dan Smith tentang Pembangunan Ekonomi yang menjelaskan bahwa kota metropolitan yang dihuni oleh manusia dengan kepadatan penduduk tinggi

¹ Semarang, B. K. (2023). *Indikator Kemsikinan: Badan Pusat Statistik Kota Semarang*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang: <https://semarangkota.bps.go.id/>

² *ibid*

³ Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat Kegiatan IBM Direktorat PKP. (2022). *Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh*. Laporan Penelitian. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

akan mendorong permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial, hingga kondisi lingkungan yang tidak baik. ⁴

Selanjutnya, mengacu apa yang dinyatakan oleh Todaro dan Smith tersebut, hal yang lumrah sering dijumpai oleh kota-kota besar di Indonesia salah satunya adalah kemunculan permasalahan kemiskinan masyarakat. Hal tersebut terjadi di Kota Semarang, permasalahan kemiskinan di Kota Semarang dengan sajian data sebagai berikut;

Tabel 1.1 Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Semarang dari Tahun 2021-2023

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Rp522.691	Rp543.929	Rp589.598
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	79.58	84.45	79.87
Persentase	4.34	4.56	4.25
Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.68	0.67	0.56
Index Keparahan Kemiskinan (P2)	0.16	0.14	0.11

Sumber: semarangkota.bps.go.id/indicator/23/98/1/indikator-kemiskinan.html

Persentase kemiskinan di Kota Semarang dapat dinyatakan dengan fluktuatif dari tahun 2021- 2023. Meski pada tahun 2021-2022, Pemerintah Kota Semarang mampu menekan kemiskinan dalam beberapa poin, akan tetapi angka tersebut kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Begitu pun yang angka ketimpangan sosial yang terjadi di Kota Semarang. Menurut dat BPS tersebut, ketimpangan sosial Kota Semarang dinyatakan dalam Index P1, dalam data tersebut meski ketimpangan Kota Semarang jauh dari rata-rata yang

⁴ Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

dinyatakan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex akan tetapi penurunan beberapa poin juga terjadi.

Kondisi kepadatan penduduk dan kemiskinan, terjadi tak terlepas dari beberapa faktor dan pengaruh. Dalam kondisi tertentu kepadatan penduduk di perkotaan kerap kali menimbulkan sebuah kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu dikarenakan sifat penduduk perkotaan cenderung dalam kondisi kelompok Patembayan yang impersonal dengan dominasi kompetisi sehingga tak jarang ketimpangan terjadi juga terjadi karena kondisi sosial yang padat juga mendorong pengelompokan-pengelompokan baru oleh masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi tertentu.

Permasalahan tersebut memang nyata dan berada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa “pekerjaan rumah” dari permasalahan kepadatan penduduk, mengentaskan kemiskinan, menata kota dari kekumuhan, dan lain-lain. Melalui beberapa program, Pemerintah Kota Semarang mencoba menghadirkan salah satu alternatif kebijakan yang mampu memberikan penyelesaian masalah yang terjadi di Kota Semarang. Salah satunya melalui Kampung Tematik yang telah di inisiasi pada tahun 2018 dengan kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Kebijakan kampung tematik didasari atas permasalahan penduduk yang fokus utamanya ditunjukkan untuk menangani kawasan kumuh dan kemiskinan serta menanggulangi secara besar permasalahan kepadatan penduduk di wilayah-wilayah kelurahan di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang atas prakarsanya dalam kebijakan Kampung Tematik di Kota Semarang mendorong kebijakan yang memiliki maksud untuk;

- a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal;
- b) meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- c) mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan;

Selain itu, untuk memenuhi maksud dari kebijakan tersebut, melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 mengharap adanya sebuah tujuan besar untuk;

- a) penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
- b) perbaikan lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- c) peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d) peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat;
- e) peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai semangat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- f) memberi pengaruh positif bagi kampung-kampung lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung tematik serupa;

- g) menggugah pengusaha di dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk mendukung pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang;
- h) mendorong peningkatan perputaran ekonomi lokal/wilayah.
- i) menambah tujuan atau destinasi wisata.

Oleh karenanya dalam keberjalanan waktu dalam implementasi kebijakan kampung tematik, Pemerintah Kota Semarang mendorong sebuah konsep dengan desain keberagaman program pemberdayaan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan potensi yang ada di wilayah yang dijadikan sebagai kampung tematik. Dalam konsep tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan sebuah keswadayaan berbagai aktor dalam *Good Governance* (Negara, Swasta, dan Publik) mampu mendorong kemajuan sebuah wilayah potensial di Kota Semarang.

Hingga tahun 2021 jumlah kampung tematik di Kota Semarang mencapai pada angka 260 Kampung yang tersebar di seluruh Kota Semarang.⁵ Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut;

⁵ Pemerintah Kota Semarang. (2022). *Kampung Tematik Kota Semarang*. Dipetik 2023, dari Data Kampung Tematik: <https://kampungtematik.semarangkota.go.id/web/datakampungtematik>

Tabel 1.2 Jumlah Kampung Tematik di Kota Semarang Tahun 2017-2022

KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG TEMATIK
Banyumanik	18
Candisari	14
Gajahmungkur	12
Gayamsari	10
Genuk	22
Gunungpati	21
Mijen	27
Ngaliyan	13
Pedurungan	17
Semarang Tengah	15
Semarang Timur	16
Semarang Barat	24
Semarang Selatan	11
Semarang Utara	14
Tembalang	17
Tugu	9
TOTAL	260

Sumber: <https://kampungtematik.semarangkota.go.id/web/datakampungtematik>

Total jumlah kampung tematik yang telah dicanangkan oleh Pemkot Semarang dari tahun 2017-2022 melebihi dari jumlah 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Artinya dengan jumlah tersebut, dapat saja setiap kelurahan yang ada di Kota Semarang memiliki jumlah kampung tematik lebih dari satu kawasan. Dengan jumlah 260 kampung tematik tersebut, keberadaan Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik mampu sesuai tujuan dari awalnya dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kota Semarang seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kondisi lingkungan.

Selanjutnya, peneliti akan meneliti keberadaan kampung tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Kecamatan Gajahmungkur merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis dan eksklusif di Kota Semarang. Secara Geografi kondisi lingkungan pada Kecamatan Gajahmungkur terutama yang terletak di wilayah Kelurahan Gajah Mungkur, memiliki kawasan

elite dengan perumahan yang cukup bergengsi dengan penduduk kalangan ke atas dan di dalamnya juga terdapat beberapa kediaman pejabat yang berdinis pada Pemerintah Kota Semarang hingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tidak hanya hal tersebut, Kecamatan Gajahmungkur juga dapat dijumpai memiliki kawasan pemukiman padat penduduk bagi masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di seluruh kelurahan. Hal ini berdampak pada kondisi masyarakat di wilayah tersebut yang lebih heterogen dibandingkan dengan wilayah yang terletak di daerah pinggir kota. Seperti di daerah pesisir dan pegunungan yang dimana masyarakat di sana lebih bersifat homogen. Keterkaitan heterogenitas dengan implementasi kebijakan kampung tematik itu sendiri memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan kondisi beraneka ragam sifat, sosial, ekonomi di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kampung tematik di wilayah tersebut.

Kampung Tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur tersebar pada seluruh kelurahan. Menurut data yang diperoleh dari laman *website* Pemerintah Kota Semarang data tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut;

Tabel 1.3 Kampung Tematik yang Berada di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur 2017-2022

KECAMATAN	KELURAHAN	TEMA KAMPUNG
Gajahmungkur	Bendan Dhuwur	Kampung Kamsoli
Gajahmungkur	Bendan Dhuwur	Kampung Angkringan
Gajahmungkur	Bendan Dhuwur	Kampoeng Pahlawan
Gajahmungkur	Bendan Ngisor	Kampung Ramah Lansia
Gajahmungkur	Bendan Ngisor	Kampung Kreatif Kopwan Sri Rejeki
Gajahmungkur	Bendungan	Kampung Batik
Gajahmungkur	Gajahmungkur	Kampung Jajan Pasar
Gajahmungkur	Karangrejo	Kampung Jahit
Gajahmungkur	Karangrejo	Kampung Gamelan
Gajahmungkur	Lempongsari	Kampung Beliksari
Gajahmungkur	Petompon	Kampung Jamu
Gajahmungkur	Sampangan	Kampung Olahan Tempe
Gajahmungkur	Sampangan	Kampung Krida Kamulyan

Sumber: <https://kampungtematik.semarangkota.go.id/web/datakampungtematik>

Terdapat 13 Kampung Tematik yang tersebar di Kecamatan Gajahmungkur, dan konsepsi yang diadopsi memiliki keragaman yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Di antara ke-13 kampung tersebut dalam implementasinya tidak selalu memiliki keberjalanan yang mulus dan berhasil, bahkan hanya beberapa kampung saja dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan implementasi program kampung tematik pada Kecamatan Gajahmungkur dapat dilihat pada Kampung Jajan Pasar yang terletak di Kelurahan Gajahmungkur.

Kampung Jajanan Pasar Semarang yang terletak di Jalan Stonen Timur RW 09 merupakan pusat pengembangan dan informasi mengenai produsen jajanan pasar di Kampung Tematik Jajan Pasar. Pembuatan produk UMKM jajan pasar antara lain: getuk lindri, arem-arem, resoles, klepon, sentiling, apem dengan segala pengembangan inovasi dalam pembuatannya. Pemberdayaan wanita utamanya ibu-

tematik itu hanya memajang papan nama saja, tetapi tidak satu pun dijumpai aktivitas seperti yang diharapkan dengan implementasi kampung tematik Kota Semarang.

Keberadaan implementasi kampung tematik dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki ketertarikan tersendiri di Kecamatan Gajahmungkur. Terdapat kampung tematik dengan segala keberhasilannya dan terdapat juga kampung tematik dengan minim pelaksanaannya. Hal ini tidak sesuai dengan konsepsi dan daya tawar seperti yang dinyatakan dalam Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 yang menyatakan keberlangsungan implementasi kampung tematik sebaiknya digunakan untuk mengentaskan permasalahan lingkungan, menggali potensi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalam prosesnya. Oleh karenanya dengan permasalahan tersebut memunculkan sebuah ide dan gagasan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan judul penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kampung tematik di Kecamatan Gajah Mungkur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gajahmungkur ini untuk menganalisis implementasi kampung tematik yang terjadi pada tahun 2021. Selain itu, dalam penelitian ini juga dicapai beberapa tujuan yang di antaranya;

1. Mengidentifikasi implementasi kampung tematik yang terjadi pada Kecamatan Gajahmungkur.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang terjadi pada implementasi kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan. Terutama dalam bidang studi ilmu politik, yaitu mengenai implementasi kebijakan melalui kampung tematik di kecamatan Gajahmungkur.
2. Memberikan pengetahuan tentang implementasi, hambatan dan tantangan program kampung tematik di setiap kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian akademisi untuk membedah permasalahan implementasi kebijakan

kampung tematik di Kota Semarang, terkhusus di Kecamatan Gajahmungkur,

2. Dalam kajian tertentu dibidang pemerintahan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan pendapat sebagai penyelesaian terhadap permasalahan implementasi kebijakan kampung tematik yang terjadi di Kota Semarang,
3. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pedoman pada bidang pemerintahan terkait pelaksanaan teknis implementasi Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, merupakan suatu kajian terhadap penelitian terdahulu dalam konsep ide dan gagasan yang sama dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dasar untuk memunculkan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Dalam kaitannya, penelitian terdahulu dalam penelitian ini tidak jauh dengan keberadaan permasalahan kampung tematik di Kota Semarang, terkhusus yang terlaksana pada Kecamatan Gajahmungkur.

Pertama, penelitian kampung tematik pernah dilakukan oleh Afriska Yoga S (2018) dengan judul “*Stakeholders* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang”. Dalam penelitiannya, Afriska Yoga S. menitik beratkan keberadaan Kampung Tematik Jajan Pasar di Kecamatan Gajahmungkur dalam segi pemberdayaan masyarakat. Afriska juga membahas

karakteristik masyarakat, keikutsertaan dalam perencanaan, pengetahuan aktor-aktor atau *stakeholders* yang terlibat dalam Program Kampung Tematik Kota Semarang serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan *stakeholders*. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan, sehingga program yang dibuat oleh Pemerintah dapat berjalan dengan lancar.⁸

Kedua, penelitian kampung tematik Kota Semarang juga dilakukan oleh Rizka Nuri W (2018) dengan judul “Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh”. Pembahasan yang dilakukan oleh Rizka Nuri W. difokuskan ke dalam inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap Kampung Tematik yang terjadi di Kampung Sehat Ramah Anak. Kajian yang dilakukan oleh Rizka Nuri W. tidak memberikan dampak yang mendalam secara signifikan. Rizka Nuri W. hanya membahas sebagian kecil dan sebagian umum apa yang terjadi terhadap inovasi-inovasi di Kampung Tematik tersebut terhadap pengentasan pembangunan kawasan kumuh.⁹

Ketiga, penelitian kampung tematik dilakukan oleh Cindy Citya D (2017) dengan judul “Konsep Kampung Tematik Kavling Agrowisata Syariah Kota Semarang”. Cindy Citya D. memfokuskan pembahasan terhadap perencanaan yang terjadi pada Kampung Tematik Kaveling Agrowisata Syariah di Kota Semarang untuk mendongkrak ekonomi kreatif dan syariah di Kota Semarang. Cindy Citya

⁸ Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). Jurnal Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.

⁹ Widiastuti, R. N. (2018). Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Sehat Ramah Anak). Jurnal Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.

hanya memaparkan bagaimana ide dan konsep kampung tematik tersebut terbentuk dan tidak banyak membahas bagaimana proses terjadi hingga kendala yang dialami oleh penyelenggara kampung tematik.¹⁰

Lebih dalam lagi, masih banyak kajian ilmiah kampung tematik di Kota Semarang. Peneliti hanya mengambil beberapa penelitian sebagai acuan konsep permasalahan dalam penelitian ilmiah ini. Persamaan yang terjadi dari ketiga penelitian dengan penelitian ini adalah pembahasan permasalahan terhadap kampung tematik di Kota Semarang.

Sedangkan perbedaan yang dapat ditonjolkan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah; Pertama, dalam penelitian ini akan difokuskan dalam satu wilayah kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kedua, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini difokuskan terhadap kajian implementasi kebijakan kampung tematik yang terjadi di Kecamatan. Gajahmungkur dengan landasan teori Implementasi Kebijakan milik George C. Edward III yang dalam teori tersebut akan menganalisis dan menjabarkan data dalam lingkup permasalahan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketiga, dalam permasalahan ini juga akan dijelaskan faktor penghambat dan pendukung dari terlaksananya implementasi kebijakan Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur.

¹⁰ Dima, C. C. (2017). KONSEP KAMPUNG TEMATIK KAVLING AGROWISATA. *Jurnal Udinus*.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dapat dipahami dalam dunia akademisi ilmu pemerintahan dalam dekade terakhir sebagai proses pemahaman yang mampu mendukung pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang relevan sesuai dengan kondisi permasalahan masyarakat dan wilayahnya. Sebainya seperti yang dinyatakan dalam kajian studi analisis kebijakan publik, kebijakan publik mampu memberikan dorongan yang relevan untuk menuntaskan permasalahan mendesak bidang ekonomi dan sosial.

Pakar kebijakan pertama Harlod Lasswell mendefinisikan konsep ilmu kebijakan sebagai tolok ukur bidang penyelidikan mereka adalah relevansi dengan dunia politik dan sosial ¹¹. Hal itu disetujui oleh Dunn sebagai pakar kebijakan publik pada generasi selanjutnya yang mampu mendefinisikan kebijakan publik sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan sebuah metode penyelidikan dan argumen untuk menghasilkan dan mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat digunakan dalam pengaturan politik untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan ¹². Dalam hal tersebut Lasswell dan Dunn mencoba menanggapi langsung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Robert

¹¹ Laswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. California: Stanford University Press.

¹² Dunn, W. N. (1981). *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.

Lynd (1939) dalam “*Knowledge for What?*” dan “*Relentless Emphasis of Pragmatism*” oleh John Dewey.¹³

Perkembangan kebijakan publik juga didorong dengan permasalahan dunia dalam skala global yang menjadi semakin kompleks sehingga dalam dekade ke depan dan terakhir, orientasi dalam perumusan kebijakan publik juga harus lebih sentral, hal tersebut dikarenakan kebijakan publik seharusnya mampu mengakomodir keberadaan masalah yang menekan masyarakat dengan pemerintahnya. Untuk memperkuat argumentasi akan kebijakan publik tersebut, dapat dibuktikan dalam berbagai pemerintahan di dunia dan setiap birokrasi atau lembaga pemerintah membentuk semacam kesepakatan (terutama yang berhubungan dengan analisis dan / atau evaluasi kebijakan) untuk mendukung keputusan dan agenda administratifnya

Namun, pada saat yang sama, pakar kebijakan lain dalam sudut pandang yang berbeda kerap kali menggambarkan kebijakan publik diciptakan sebagai bentuk pengabaian umum oleh pemangku kepentingan politik. Perumus kebijakan dibidang legislatif kerap kali menyuarakan kepentingan individu dan kelompoknya daripada permasalahan yang mendesak di kalangan umum. Hal tersebut seperti yang nyatakan Donald Beam yang telah mencirikan analisis kebijakan sebagai penuh

¹³ Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)*. New York: CRC Press.

dengan "ketakutan, paranoia, ketakutan, dan penyangkalan" dan bahwa mereka tidak "memiliki banyak kepercayaan" ¹⁴.

Lebih dalam, merangkum pendapat dari pakar kebijakan publik, peneliti mencoba memahami dan menelaah kebijakan publik sebagai kajian yang mampu mengumpulkan berbagai argumentasi yang mendasar dalam permasalahan tertentu yang melibatkan beberapa aktor untuk menghasilkan sebuah keputusan guna menangani permasalahan secara relevan dan menghasilkan sebuah keputusan bagi khalayak umum. Dalam kajian oleh Laswell, kebijakan publik didorong dengan siklus ideal.

Bagan 1.4 Siklus Ideal Kebijakan Publik oleh Laswell



Sumber: *The Policy Orientation* (Laswell)

Siklus yang ideal dalam kebijakan publik dimulai dengan formulasi kebijakan. Dalam proses formulasi melibatkan identifikasi kebijakan hingga permasalahan yang akan diputuskan. Kemudian, yang dilanjutkan dengan

¹⁴ Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)*. New York: CRC Press.

pengambilan keputusan yang melibatkan aktor-aktor dan ahli-ahli tertentu sesuai dengan permasalahan yang ditelaah diformulasikan. Kemudian setelah penetapan kebijakan, akan ada sebuah implementasi yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan tersebut oleh khalayak umum, pemerintahan dan pihak terkait. Implementasi kebijakan juga merupakan pembuktian dari keberhasilan dari formulasi dan pemutusan kebijakan tadi. Beriringan dengan implementasi juga beriringan dengan adanya monitoring serta evaluasi kebijakan untuk memberikan kontrol dari pelaksanaan kebijakan tersebut ¹⁵.

Lebih dalam lagi, dalam penelitian ini akan memfokuskan kebijakan publik dalam implementasi kebijakan. Peneliti berusaha untuk menggali ke dalam proses pengimplementasian/pelaksanaan kebijakan Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Kajian teori implementasi kebijakan beserta argumentasi pemilihan teori dijelaskan dalam Sub-Subbab selanjutnya.

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

¹⁵ Laswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. California: Stanford University Press.

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Salah satu kunci peran penting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Kebijakan publik digambarkan sebagai proses pelaksanaan dari pengambilan keputusan dari yang telah ditetapkan. Implementasi menjadikan hal penting dikarenakan dalam proses pelaksanaan kebijakan mendorong interaksi yang kompleks dari berbagai aktor yang terlibat untuk saling sepakat menjalankan sebuah keputusan. Apabila implementasi ini berjalan dengan baik, maka dalam proses selanjutnya kebijakan tersebut dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang layak. Sebaliknya, apabila tidak berjalan, maka kebijakan tersebut dinyatakan yang tidak layak dengan opsi dapat diperbaiki atau dihapuskan.

Studi implementasi dapat ditemukan di persimpangan administrasi publik, teori organisasi, penelitian manajemen publik, dan studi ilmu politik¹⁶. Implementasi kebijakan dalam makna yang luas didefinisikan sebagai studi tentang perubahan kebijakan¹⁷. Sedangkan pada tahun 1970an, studi implementasi kebijakan yang muncul di Amerika Serikat merupakan serangkaian reaksi terhadap kekhawatiran yang berkembang atas efektivitas program reformasi yang luas.¹⁸ Pernyataan tersebut merupakan balasan atau reaksi terhadap implementasi

¹⁶ Schofield, J., & Sausman, C. (2004). Symposium on Implementing Public Policy: Learning from Theory and Practice: Introduction. *Public Administration*, 235.

¹⁷ Jenkins, W. I. (1978). *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. Oxford: Martin Robertson.

¹⁸ Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)*. New York: CRC Press.

kebijakan pada tahun 1960an yang digambarkan sebagai sebuah mandat politik dalam serangkaian aturan yang berbenturan dengan khalayak umum.¹⁹ Mandat politik yang terjadi merupakan sebuah gambaran kepentingan untuk mengakomodir kepentingan politisi yang saling memperkaya diri melalui kebijakan yang tersusun secara administratif.

Berbeda lagi yang terjadi pada abad ke-21, keberjalanan waktu dan beberapa faktor pengaruh akan kondisi politik dunia hingga berbagai negara, definisi implementasi publik kemudian berubah sebagai proses "menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan" ²⁰. Tokoh-tokoh dan pakar implementasi kebijakan kemudian saling bermunculan untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang sesuai untuk merelevansikan implementasi kebijakan yang ideal.

Kembali sedikit pada tahun 1980, kemunculan George C. Edward III sebagai salah satu akademisi kebijakan publik merupakan gagasan yang kemudian disambut dengan hangat oleh para pakar didunia politik dan pemerintahan serta administrasi publik ²¹. Implementasi Kebijakan oleh Edward III menyatakan sebagai tahap pelaksanaan dari keputusan kebijakan dari pemangku kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang memberikan sebuah regulasi mendalam bagi masyarakat. Implementasi kebijakan publik tersebut merupakan prosesi yang

¹⁹ Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)*. New York: CRC Press.

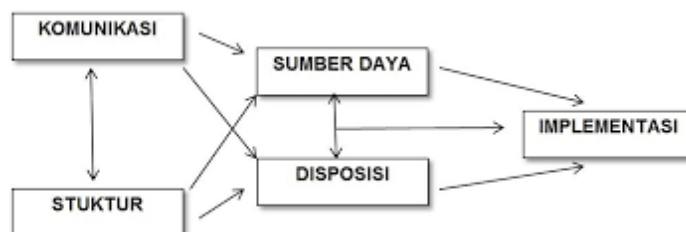
²⁰ Barret, S. (2004). Implementation Studies: Time for a Revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies. *Public Administration*, 251.

²¹ Fishcer,. *op.cit.*

penting yang mentransmisikan seberapa baiknya suatu kebijakan. ²²Apabila kebijakan tidak direncanakan atau dipersiapkan dengan baik, maka implementasinya tidak akan berjalan, dan sebaliknya apabila para pemangku kebijakan mampu memberikan transmisinya kepada para pelaksana kebijakan, maka prosesi implementasi akan berjalan dengan baik.

George C. Edward III juga mengemukakan dalam teorinya bahwa, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan empat faktor, di antaranya adalah komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi atau interaksi satu sama lain. Keempat faktor tadi saling beroperasi dan saling berinteraksi satu sama lain.

Bagan 1.5 Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan oleh Edward III



Sumber: *Implementing Public Policy* (Edward III)

Selanjutnya, faktor-faktor tersebut dijelaskan dengan detail oleh Edward III sebagai berikut;

1. Komunikasi, agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sebuah kejelasan komunikasi antara pemangku

²² Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.

kebijakan, pelaksana, dan pengguna kebijakan. Komunikasi dalam implementasi dipahami sebagai keberhasilan para pelaksana kebijakan untuk mengkomunikasikan kebijakan sesuai apa yang didesain kepada pengguna kebijakan. Oleh Edward III, komunikasi ini memuat faktor transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang dilakukan oleh pelaksana kepada pengguna.

2. Sumber daya, salah satu faktor yang mendorong keberhasilan kebijakan adalah adanya sumber daya-sumber daya yang mampu mengakomodir jalannya implementasi. Dengan komunikasi yang baik tanpa adanya dorongan sumber daya, maka implementasi akan menjadi nihil. Oleh Edward III, Sumber Daya ini memuat faktor sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya anggaran.
3. Disposisi, disposisi atau sikap yang dijelaskan oleh Edward III merupakan sebuah sikap dari pemangku, pelaksana, dan pengguna kebijakan untuk berkomitmen melaksanakan kebijakan dengan baik. Komitmen tersebut merupakan bagian dari kesungguhan yang dibalut dengan sikap untuk melaksanakan kebijakan. Oleh Edward III, Disposisi dijelaskan dengan keberadaan efek dari sikap/watak, terbentuknya nilai dalam kebijakan, dan sikap pelaksana terhadap nilai yang dibentuk.
4. Struktur Birokrasi, dapat dipahami sebagai bentuk interaksi atas pembagian tugas dalam pelaksanaan dari implementasi kebijakan yang terjadi. Edward III menjelaskan dalam struktur birokrasi memuat keberadaan interaksi antar

aktor pemangku, pelaksana, pengguna dan adanya standar operasionalisasi yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut.²³

Selanjutnya keterkaitan implementasi kebijakan publik dalam penilaian ini merupakan dasar pemikiran sebagai acuan permasalahan untuk meneliti kebijakan kampung tematik di Kota Semarang. Oleh karenanya seperti yang digambarkan dalam latar belakang, perumusan masalah, penelitian terdahulu, dan kajian teori kebijakan publik, peneliti kemudian mengadopsi Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III sebagai dasar pemikiran untuk menggali data lebih dalam dan acuan dalam penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kecamatan Gajahmungkur”

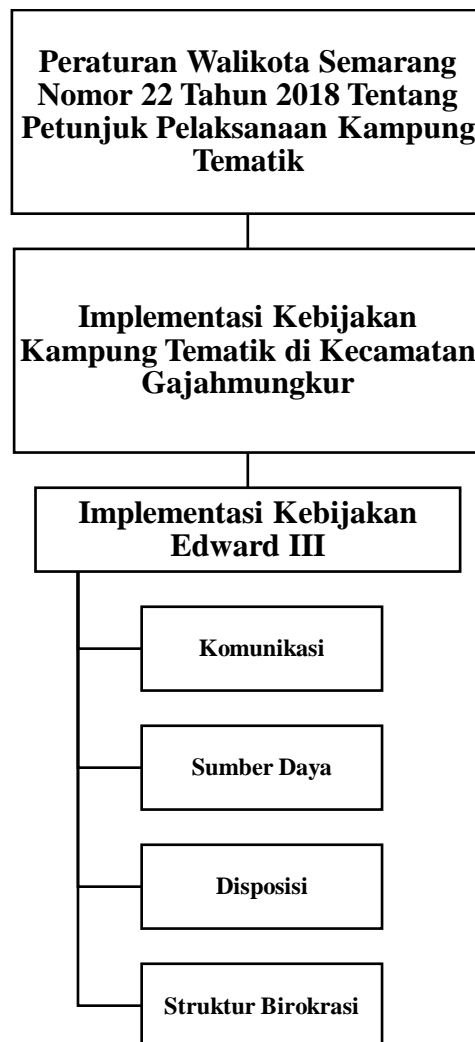
Pemilihan Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III dalam penelitian ini dikarenakan, teori oleh Edward III tersebut mampu memberikan jbaran analisa yang mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan Perwalkot Semarang No. 22 tahun 2018 di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Terlebih secara detail teori Edward III mampu memberikan acuan untuk membangun argumentasi dan pernyataan terhadap permasalahan yang terjadi secara objektif antara pemangku, pelaksana, dan pengguna kebijakan Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur. Teori Edward III juga mampu memberikan

²³ Edward III, *loc.cit.*

dorongan dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor penghambat serta pendukung dalam kebijakan Kampung Tematik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Bagan 1.6 Bagan Operasionalisasi Konsep



1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik merupakan suatu produk hukum yang menjadi sebuah kebijakan publik yang berlaku di Kota Semarang dari tahun 2018 hingga saat ini. Keberadaan Perwalkot Semarang tersebut didasari atas permasalahan kemiskinan, kondisi wilayah yang kumuh dan padat, serta

potensi lokal wilayah yang ada di Kota Semarang yang tidak terangkat untuk diselesaikan melalui swasembada lokal yang menjadi keunggulan yang baik dari segi sosial dan ekonomi.

2. Fokus penelitian ini kemudian akan dikembangkan dalam satuan wilayah kerja Pemerintah Kota Semarang yang berada di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang menjadi implementor dari 13 dari 260 kampung tematik di Kota Semarang.
3. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memfokuskan prosesi kebijakan publik pada kajian implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan kebijakan dari pemangku kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang memberikan sebuah regulasi mendalam bagi masyarakat. Implementasi kebijakan publik tersebut merupakan prosesi yang penting yang mentransmisikan seberapa baiknya suatu kebijakan.
4. Kaitannya dalam penelitian ini, kemudian keberhasilan serta permasalahan dari implementasi Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur dengan landasan Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 akan di analisis dan dibahas tentang faktor-faktor (yang mempengaruhi) secara detail dan mendalam dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III yang menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Edward III			
1	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Transmisi komunikasi dalam Kampung Tematik 2. Terdapat Kejelasan dalam komunikasi antar pelaksana dan pengguna 3. Adanya konsistensi komunikasi yang dibangun untuk keberlanjutan program Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur
2	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Fasilitas 3. Sumber Daya Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sumber daya manusia yang mendukung Kebijakan 2. Terdapat Fasilitas yang memadai dari pelaksana kebijakan kepada pengguna Kampung Tematik 3. Ketersediaan anggaran yang mumpuni baik dari pemerintah atau <i>stakeholder</i> bahkan secara swadaya
3	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efek dari sikap/watak, 2. Terbentuknya nilai dalam kebijakan, dan 3. Sikap pelaksana terhadap nilai yang dibentuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesungguhan untuk menerapkan pelaksanaan dan pengembangan Kampung Tematik antara pelaksana dan Pengguna 2. Adanya nilai-nilai yang mampu dibawa oleh pelaksana kepada pengguna dan sebaliknya, 3. Adanya respons antara kedua belah pihak untuk menyikapi sikap yang solid dan komit

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Edward III			
			mengembangkan Kampung Tematik
4	Struktur Birokrasi	1. Interaksi antar aktor pemangku, pelaksana, pengguna dan 2. Adanya standar operasionalisasi yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut	1. Adanya interaksi atau aksi timbal balik yang diberikan antara pelaksana dan pengguna dalam pembagian tugas dan wewenang 2. Adanya Standar Operasional untuk memadai kewenangan yang ada di Program Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur.

Sumber: Edward III dan olah data pribadi

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Sedangkan Pendekatan deskriptif yaitu sebuah pendekatan yang menjawab suatu rumusan masalah dengan memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²⁴

²⁴ Lexy J. Meleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Penggambaran fenomena tersebut digali melalui perolehan data wawancara yang menjadi subjek penelitian dan observasi situasi fisik dan sosial kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur yang dipadukan dengan teori George Edward III (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitian dengan lokasi di Kecamatan Gajahmungkur. Lokasi utama pengambilan data dipusatkan pada Kantor Kecamatan Gajahmungkur yang beralamat pada Jalan S. Parman No. 30A, Kota Semarang; Kantor Kelurahan Gajahmungkur yang beralamat pada Jl. Merapi No. 2A; dan Kampung Tematik Jajan Pasar di Kelurahan Gajahmungkur RW. 09. Selain itu, dalam penelitian ini juga melakukan pengambilan data pada beberapa wilayah pada kelurahan yang melakukan program kampung tematik di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan data di

lapangan yang telah ditentukan tujuannya²⁵. Subjek yang diteliti difokuskan dengan melakukan wawancara kepada;

1. Pihak Kecamatan Gajahmungkur, dalam hal ini subjek utama adalah Anis Kartika Ningrum, S. H selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Gajahmungkur, dan
2. Pihak Kelurahan Gajahmungkur, dalam hal ini subjek yang menjadi narasumber adalah Esty Puji Cahyaningsari, A. Md. selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gajahmungkur.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa kata – kata tertulis dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan Sumber data penelitian ini berupa dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan metode wawancara secara langsung bersama informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara (*interview guide*). Prosesi ini telah dijelaskan pada sub-subbab subjek wawancara.

2. Data Sekunder

²⁵ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti tinjauan literatur, dokumentasi, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan objek kajian penelitian dan permasalahan, yang dalam hal ini mengenai pengawasan dan pelayanan publik yang nantinya akan dijadikan panduan dalam melakukan penelitian. Data sekunder juga digunakan sebagai data penunjang dari data primer.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini berguna agar peneliti mendapatkan informasi yang mendalam dan terpercaya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pedoman wawancara agar peneliti lebih mudah untuk menggali data secara sistematis.

Selanjutnya, dalam proses wawancara dalam penelitian ini, peneliti sempat mengalami kendala yang begitu panjang. Pertama adanya prosesi pergantian Camat Gajahmungkur yang kemudian perolehan data dilakukan melalui Kasi Pembangunan Kecamatan yang mengetahui kondisi asli dari Kampung Tematik di Gajahmungkur. Peneliti juga mengalami kendala dalam wawancara kepada Lurah Gajahmungkur, hal ini disebabkan karena Lurah Gajahmungkur dalam kondisi berpulang pada pangkuan Tuhan YME. Oleh karenanya data yang diperoleh dialihkan kepada Kasi Pembangunan Kelurahan

yang kemudian menjadi penanggungjawab pelaksanaan Kampung Tematik di wilayah Kelurahan Gajahmungkur.

Meski dengan kendala demikian, proses perolehan data melalui subjek wawancara kepada narasumber dilakukan dengan baik hingga memperoleh data yang jelas dan mampu menjawab bagaimana prosesi Implementasi Perwalkot No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam kegiatan penelitian ini yang difokuskan dengan pengamatan yang mendalam terhadap objek ataupun subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

Selanjutnya, observasi ini dilakukan di Kecamatan Gajahmungkur, Kelurahan Gajahmungkur, dan Kampung Tematik Jajan Pasar.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka berguna untuk menyelaraskan antara teori dengan realitas di lapangan, dengan mengumpulkan buku - buku, jurnal maupun penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik dan mal administrasi yang nantinya akan berguna sebagai bahan penulisan penelitian.

Studi literatur yang diperoleh di antaranya; Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2018; Buklet Kampung Tematik Kota

Semarang dan Kecamatan Gajahmungkur; Profil dan Website yang menunjang data kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk atau metode pengumpulan data dalam penelitian dengan mengumpulkan tulisan, foto/gambar, maupun karya ilmiah dari seseorang. Dalam dokumentasi akan dikumpulkan juga bukti fisik sebagai penguat dari data-data sekunder dalam penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Selanjutnya, setelah seluruh data telah terkumpul terdapat beberapa proses dalam analisis data dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut;

1. Reduksi Data

Reduksi data berguna untuk merangkum data – data yang telah di kumpulkan oleh peneliti sehingga dapat diambil inti dari data tersebut yang nantinya akan mempermudah peneliti dalam menyederhanakan data yang diperoleh selama pencarian data di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, penyajian data dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga perlu adanya penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

3. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan peneliti mengungkapkan hasil dari penelitian yang sudah diteliti dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep – konsep dasar dalam penelitian.